

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan fundamental yang berperan penting dalam membentuk kompetensi, karakter, dan kualitas hidup manusia. Sebagai sarana utama dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia, pendidikan memerlukan dukungan pendanaan yang memadai agar dapat terlaksana secara optimal. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjamin pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui berbagai program strategis, salah satunya melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini dirancang untuk membantu satuan pendidikan dalam memenuhi kebutuhan dasar operasional, meningkatkan mutu layanan pembelajaran, serta mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh orang tua siswa, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2005, sebagai wujud nyata

pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui program ini, sekolah dan madrasah diberikan kewenangan untuk mengelola dana BOS secara mandiri dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kemandirian pengelolaan ini dimaksudkan agar setiap satuan pendidikan dapat menyesuaikan penggunaan dana sesuai kebutuhan prioritas, baik untuk kegiatan pembelajaran, pengadaan sarana prasarana, maupun pembayaran honor guru non-PNS.

Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (Kepmenag) Nomor 451 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah, terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan dana BOS di lingkungan Kementerian Agama. Regulasi tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan dana BOS bagi madrasah sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, bukan lagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan ini mendorong perlunya tata kelola keuangan madrasah yang lebih terstruktur dan akuntabel. Dalam konteks ini, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi dasar utama agar masyarakat dan pemerintah dapat menilai sejauh mana dana publik digunakan sesuai tujuan pendidikan (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2018).

Praktik pengelolaan dana BOS di lapangan seringkali masih dihadapkan pada permasalahan klasik, yakni sistem pencatatan dan

pelaporan yang masih dilakukan secara manual. Proses manual tersebut berisiko tinggi terhadap terjadinya kesalahan pencatatan (*human error*) seperti kesalahan nominal, perhitungan, atau penginputan data yang dapat mengakibatkan keterlambatan pelaporan, serta inefisiensi waktu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Akibatnya, informasi akuntansi yang dihasilkan seringkali kurang akurat dan tidak dapat segera dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan manajerial. Hal ini tentu menghambat terwujudnya tata kelola keuangan madrasah yang transparan dan akuntabel (Marianata, 2025).

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Kementerian Agama mengembangkan sistem informasi akuntansi digital bernama Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (E-RKAM) Sistem aplikasi ini dapat diakses melalui laman resmi <https://frontend.erkam-v2.kemenag.go.id> dan dirancang untuk membantu madrasah dalam menyusun perencanaan anggaran, melaksanakan kegiatan, serta membuat laporan pertanggungjawaban secara digital sehingga pengelolaan dana bos dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. E-RKAM berfungsi tidak hanya sebagai alat penyusunan rencana anggaran, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan audit internal madrasah. Melalui aplikasi E-RKAM ini, setiap transaksi keuangan terekam secara otomatis, meminimalkan

kesalahan pencatatan, serta meningkatkan efisiensi pengawasan dan audit (A. E. Putri et al., 2025).

E-RKAM dikategorikan sebagai Sistem Informasi Akuntansi (SIA) karena memenuhi fungsi utama sistem akuntansi, yaitu mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan bagi manajemen (Yushita Marini et al., 2024). Aplikasi ini mendukung kontrol internal melalui mekanisme otorisasi berjenjang, verifikasi data, dan integrasi laporan, sehingga mampu menjaga keandalan data akuntansi. Dengan demikian, E-RKAM bukan sekadar aplikasi administratif, tetapi juga instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengendalian internal di lembaga pendidikan.

Penerapan E-RKAM sejalan dengan kebijakan reformasi digitalisasi tata kelola pendidikan nasional. Pada tahun 2024, Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1291 Tahun 2024 mempertegas kewajiban keterlibatan pengawas dan komite madrasah dalam seluruh tahapan pengelolaan dana BOS, mulai dari perencanaan hingga pelaporan (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2024). Kebijakan ini kemudian disempurnakan melalui Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3540 Tahun 2025, yang memperkuat prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan madrasah (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2025). Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memperkuat

sistem tata kelola keuangan madrasah yang berbasis prinsip *good governance*, yakni efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

Selain itu, Surat Edaran Direktur KSKK Madrasah Nomor B-1126/DJ.I/Dt.I.I/KU.05/09/2024 menegaskan kewajiban penggunaan aplikasi E-RKAM dan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) secara penuh mulai tahun anggaran 2025. Implementasi ini merupakan langkah lanjutan dari reformasi digital Kementerian Agama untuk mendorong transformasi pengelolaan keuangan pendidikan berbasis sistem terintegrasi nasional. Integrasi ini diharapkan dapat memudahkan audit internal maupun eksternal sesuai pedoman BPKP (2021), sekaligus memastikan keselarasan perencanaan anggaran madrasah dengan sistem perencanaan pemerintah pusat (Kementerian Agama RI, 2024).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi E-RKAM masih menghadapi berbagai persoalan serius sejak awal penerapannya. Laporan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat (2023) mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap instrumen Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dan E-RKAM masih menjadi kendala utama dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan di madrasah. Rendahnya pemahaman ini berdampak pada ketidaktepatan penggunaan dana serta lemahnya integrasi antara perencanaan dan pelaporan berbasis sistem digital. Tahun berikutnya, Kementerian Agama melalui NU Online (2024) menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi E-RKAM di lapangan, antara lain

keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kesenjangan literasi digital, serta inkonsistensi penerapan di berbagai daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun aplikasi telah berjalan, efektivitasnya masih bergantung pada kemampuan dan kesiapan pengguna di tingkat madrasah. Permasalahan tersebut tidak hanya berpengaruh pada efektivitas sistem, tetapi juga pada pengelolaan keuangan madrasah, khususnya dana BOS.

Terkait konteks pengelolaan dana BOS, Kementerian Agama (2025) menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan sejumlah penyimpangan, seperti pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan, lemahnya integritas pengelola, serta peran komite sekolah yang belum optimal. Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem digital seperti E-RKAM belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas dan transparansi pengelolaan dana BOS. Idealnya, E-RKAM menjadi instrumen utama untuk memperkuat pengawasan, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana di tingkat madrasah, namun tanpa peningkatan kapasitas SDM dan komitmen kelembagaan, tujuan tersebut sulit tercapai secara menyeluruh.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika ditinjau dari aspek kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan dukungan infrastruktur teknologi. Beberapa temuan penelitian turut memperkuat kondisi ini, bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berbasis digital, termasuk E-RKAM, sering kali menghadapi hambatan

teknis seperti gangguan jaringan, kesalahan sistem (*error*), serta kurangnya kompetensi pengguna dalam mengoperasikan aplikasi (Fauziah, 2022; Suratman & Sugiyono, 2022). Hal ini menyebabkan implementasi tidak berjalan optimal dan menghambat tujuan utama sistem, yaitu peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pelaporan. Dengan demikian, efektivitas penerapan E-RKAM sangat bergantung pada faktor manusia dan dukungan kelembagaan, bukan hanya kecanggihan teknologi yang digunakan.

Di sisi lain, keberhasilan E-RKAM sebagai sistem informasi akuntansi publik juga ditentukan oleh sejauh mana sistem dalam aplikasi ini mampu mendorong pengendalian internal yang efektif dan memperkuat budaya transparansi di lingkungan madrasah. Tantangan seperti dominasi peran individu tertentu dalam perencanaan anggaran, rendahnya keterlibatan komite madrasah, dan keterbatasan evaluasi berjenjang seringkali menghambat terwujudnya prinsip *good governance*. Oleh karena itu, digitalisasi melalui E-RKAM perlu dilihat bukan hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana transformasi tata kelola keuangan madrasah menuju praktik pengelolaan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan upaya digitalisasi tata kelola keuangan madrasah, Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi salah satu instansi yang telah menerapkan aplikasi E-RKAM (Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah) sejak tahun 2020.

Aplikasi ini diimplementasikan secara bertahap di seluruh madrasah di bawah naungan Kemenag Kabupaten, termasuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) Desa Wanio di Kecamatan Panca Lautang yang telah mengimplementasi E-RKAM ini sejak tahun 2021. Tujuan utama dari penerapan E-RKAM adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan dana BOS, sekaligus memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai peruntukannya berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun, implementasi sistem digital ini tidak selalu berjalan sesuai harapan di tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan laporan keuangan madrasah, MIS DDI Wanio menerima alokasi dana BOS rata-rata sebesar Rp80.000.000 hingga Rp100.000.000 per tahun yang disalurkan dalam dua tahap pencairan. Dari jumlah tersebut, sekitar 45–50% digunakan untuk honorarium guru honorer, 20% untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, 15% untuk pengadaan bahan ajar, dan sisanya untuk pemeliharaan sarana prasarana madrasah. Meskipun dana tersebut cukup signifikan, efektivitas penggunaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Keterlambatan pencairan dana, perbedaan antara format RKAM manual dengan format E-RKAM online, serta keterbatasan fleksibilitas sistem terhadap kebutuhan riil madrasah menyebabkan laporan keuangan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual di

lapangan. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan sistem dan realitas pelaksanaannya di madrasah.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi sistem informasi akuntansi berbasis digital di lingkungan madrasah. Meskipun E-RKAM dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, efektivitasnya dalam mendukung pengendalian internal masih perlu dikaji secara mendalam. Kondisi ini menjadi alasan penting bagi peneliti untuk menelusuri bagaimana E-RKAM diimplementasikan di MIS DDI Wanio, bagaimana pengalaman pengguna dalam proses penerapannya, serta sejauh mana sistem dalam aplikasi ini mampu memperkuat tata kelola keuangan madrasah yang berintegritas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara MIS DDI Wanio, diperoleh informasi bahwa pengelolaan dana BOS melalui aplikasi E-RKAM masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan administratif. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pelatihan teknis (bimtek) yang berkesinambungan bagi pengelola madrasah. Pembaruan (update) sistem aplikasi yang dilakukan secara berkala oleh Kementerian Agama seringkali tidak diiringi dengan bimbingan teknis tambahan, sehingga menimbulkan kebingungan dan kesalahan input data. Selain itu, aplikasi E-RKAM kerap mengalami gangguan (*error*) pada server yang menghambat penyelesaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) BOS. Kondisi ini berdampak langsung

terhadap keterlambatan pencairan dana tahap berikutnya, yang pada akhirnya mengganggu pelaksanaan program kerja madrasah.

Permasalahan terkait sumber daya manusia juga menjadi faktor ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Bendahara madrasah di MIS DDI Wanio merangkap jabatan sebagai tenaga pendidik, yang mengakibatkan beban kerja ganda (*double job*). Situasi ini diperparah dengan latar belakang pendidikan bendahara yang bukan berasal dari bidang ekonomi atau akuntansi, sehingga pemahaman terhadap sistem akuntansi digital masih terbatas. Akibatnya, proses pengelolaan dana BOS melalui E-RKAM belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi akuntansi berbasis E-RKAM tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya secara profesional dan berkelanjutan.

Selain kendala teknis dan SDM, permasalahan juga muncul dalam proses perencanaan dan realisasi anggaran BOS. Wawancara menunjukkan bahwa sering kali terdapat kesenjangan antara kebutuhan riil madrasah dengan rencana anggaran yang disusun di aplikasi E-RKAM. Beberapa komponen kegiatan yang dianggarkan secara manual tidak dapat dimasukkan ke dalam format digital karena keterbatasan kategori dalam sistem aplikasi. Akibatnya, laporan realisasi keuangan tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Keterlambatan pencairan dana dari pusat turut

memperburuk efektivitas pelaksanaan program madrasah. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun E-RKAM dirancang untuk mendukung prinsip efisiensi, fleksibilitas sistem masih menjadi tantangan bagi satuan pendidikan dengan kebutuhan yang dinamis.

Masalah lain yang cukup krusial adalah rendahnya tingkat partisipasi internal dalam proses perencanaan E-RKAM. Dalam beberapa kasus, penyusunan program madrasah hanya didominasi oleh kepala madrasah dan bendahara, sementara peran guru maupun komite madrasah masih terbatas. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik yang menekankan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan yang rendah ini juga berdampak pada lemahnya pengawasan internal (*internal control*) karena tidak semua pihak memahami alur penggunaan dana secara menyeluruh. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam penerapan E-RKAM tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek budaya organisasi dan tata kelola kelembagaan madrasah.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, berbagai kajian dan literatur terkini juga memperkuat urgensi penerapan sistem informasi akuntansi digital dalam pengelolaan dana publik, termasuk di sektor pendidikan. Sistem informasi akuntansi telah diakui berperan strategis dalam mendukung perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan manajerial yang akurat dan efisien (Hajering, 2021;

Tenriwaru & Salam, 2021). Selain itu, akuntabilitas pengelolaan dana BOS sangat bergantung pada penerapan sistem informasi yang transparan, jujur, dan sesuai prosedur agar pelaporan dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (Jaya et al., 2024). Nilai-nilai integritas dan kearifan lokal juga menjadi aspek penting dalam menjaga tata kelola dana publik agar selaras dengan prinsip *good governance* (Nurwanah et al., 2022). Penerapan teknologi informasi akuntansi secara optimal terbukti meningkatkan kualitas laporan keuangan dan efisiensi pelaporan (Isnaeny et al., 2024; Wulandari et al., 2025). Selain faktor teknis, kepuasan dan pengalaman pengguna (*user experience*) menjadi kunci efektivitas sistem, di mana kesiapan sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan turut menentukan keberhasilan implementasinya (Setiadi et al., 2023). Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sistem informasi akuntansi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh faktor manusia, budaya organisasi, dan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi.

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti beragam persoalan serupa terkait implementasi E-RKAM dalam pengelolaan dana BOS. Nindi Indri Gustiyati (2023) menemukan bahwa penerapan E-RKAM di MAN 2 Kota Bandung belum berjalan optimal karena kendala pemahaman pengguna dan minimnya dukungan teknis. Penelitian Putri Wanti (2023) juga mengungkapkan bahwa meskipun

sistem telah digunakan untuk pencatatan dan pelaporan, prinsip akuntabilitas dan transparansi belum sepenuhnya tercapai karena laporan tidak dipublikasikan secara terbuka. Selanjutnya, Yuli Nur'aini, Nurlaila, dan Khairina Tambunan (2023) menemukan bahwa kendala jaringan dan keterlambatan pencairan dana masih menjadi penghambat utama, sedangkan Andini Eka Putri, Nasution, dan Harahap (2025) menekankan masih adanya *error system* serta keterbatasan akses saat penggunaan bersamaan.

Penelitian lain seperti Riza Firdausiyah, Sholihin, dan Sochib (2023) menitikberatkan pada implementasi prosedural tanpa mengkaji secara mendalam hubungan antara fungsi sistem dan tata kelola keuangan publik. Sementara Mhd. Dandy Praditia (2024) menunjukkan adanya hubungan positif antara kualitas sistem dan efektivitas pengelolaan BOS, namun tidak menelaah aspek perubahan perilaku pengguna atau dimensi akuntabilitas dalam praktiknya. Adapun penelitian Yuli Kartika Putri (2024) di MI Muhammadiyah 10 Cumpleng hanya menjelaskan tahapan perencanaan dan evaluasi tanpa menyoroti potensi permasalahan sistemik yang dapat memengaruhi efektivitas E-RKAM. Dari berbagai penelitian tersebut, tampak bahwa masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak dijelajahi, terutama pada aspek pengalaman pengguna dan hubungan aplikasi E-RKAM dengan tata kelola keuangan madrasah.

Dari berbagai penelitian tersebut dapat diidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, penelitian terdahulu belum banyak membahas fungsi E-RKAM sebagai sistem informasi akuntansi digital yang terintegrasi, yang tidak hanya mencatat dan melaporkan transaksi tetapi juga mengendalikan proses keuangan madrasah. Kedua, sebagian besar penelitian belum menguraikan secara rinci setiap tahapan pengelolaan dana BOS mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi sehingga kontribusi sistem terhadap efektivitas dan kontrol internal belum tergambar utuh. Ketiga, persepsi dan pengalaman pengguna belum banyak dieksplorasi, padahal hal tersebut penting untuk menilai sejauh mana sistem dalam aplikasi ini mempermudah atau justru menambah beban administrasi. Keempat, hubungan antara penerapan E-RKAM dan prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, serta pengendalian internal juga belum banyak dikaji secara mendalam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Fokus utama penelitian ini adalah menggambarkan proses implementasi sistem informasi akuntansi berbasis E-RKAM dalam pengelolaan dana BOS di MIS DDI Wanio, dengan menelaah setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi. Penelitian ini juga mengeksplorasi secara mendalam pengalaman dan persepsi pengguna untuk mengidentifikasi manfaat, kendala, serta strategi

adaptasi yang dilakukan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap bagaimana dampak dari implementasi Aplikasi E-RKAM yang benar-benar berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengendalian internal di madrasah.

Penelitian ini penting karena E-RKAM sebagai sistem informasi akuntansi digital memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan dana BOS di madrasah agar lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Meskipun telah diterapkan secara nasional, berbagai penelitian menunjukkan masih adanya kendala teknis, keterbatasan pemahaman pengguna, serta perbedaan antara sistem manual dan digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana E-RKAM benar-benar efektif memperkuat tata kelola keuangan madrasah.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus **“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana BOS Berbasis E-RKAM (Studi Kasus pada MIS DDI Wanio)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses implementasi sistem informasi akuntansi berbasis E-RKAM dalam pengelolaan dana BOS terkait tahap

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi di MIS DDI Wanio?

2. Bagaimana pengalaman pengguna dalam implementasi E-RKAM terkait manfaat yang dirasakan, kendala yang dihadapi, serta strategi adaptasi yang dilakukan di MIS DDI Wanio?
3. Bagaimana dampak implementasi E-RKAM terkait akuntabilitas, transparansi dan efektifitas pengendalian internal di MIS DDI Wanio?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas dapat dinyatakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan proses implementasi sistem informasi akuntansi berbasis E-RKAM dalam pengelolaan dana BOS terkait tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi di MIS DDI Wanio.
2. Mengeksplorasi pengalaman pengguna dalam implementasi E-RKAM terkait manfaat yang dirasakan, kendala yang dihadapi, serta strategi adaptasi yang dilakukan di MIS DDI Wanio.
3. Menganalisis dampak implementasi E-RKAM terkait akuntabilitas, transparansi dan efektifitas pengendalian internal di MIS DDI Wanio.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang akuntansi, khususnya terkait implementasi sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan publik di sektor pendidikan. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana Aplikasi E-RKAM diterapkan dalam pengelolaan dana BOS, sehingga dapat menambah wawasan akademik mengenai efektivitas digitalisasi sistem akuntansi di lembaga pendidikan dasar. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji aspek transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan dana publik melalui sistem informasi akuntansi berbasis digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan dana BOS.

- a. Bagi pihak madrasah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas implementasi E-RKAM, terutama dalam aspek pelaporan, perencanaan, dan

pengendalian internal agar pengelolaan dana BOS lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

- b. Bagi Kementerian Agama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola BOS di tingkat madrasah, termasuk perbaikan sistem dan pendampingan teknis.
- c. Bagi praktisi pendidikan dan auditor internal, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memahami praktik nyata pengelolaan keuangan berbasis sistem digital serta dalam mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaan E-RKAM di satuan pendidikan.
- d. Bagi masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana BOS yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab melalui dukungan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan yang jelas agar fokus kajian terarah sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman pemahaman terhadap proses dan makna suatu fenomena.

1. Ruang Lingkup Substansi

Penelitian ini berfokus pada implementasi Sistem Informasi Akuntansi berbasis Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (E-RKAM) dalam pengelolaan Dana BOS di MIS DDI Wanio. Kajian diarahkan untuk memahami proses penerapan sistem mulai dari perencanaan hingga evaluasi, lalu menelaah pengalaman pengguna terkait manfaat, kendala, dan strategi adaptasi yang dilakukan, serta bagaimana dampak dari implementasi E-RKAM dalam mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengendalian internal madrasah.

2. Ruang Lingkup Lokasi

Penelitian dilaksanakan di MIS DDI Wanio, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena madrasah tersebut telah menerapkan E-RKAM sejak 2021 namun masih menghadapi kendala dari segi teknis dan sumber daya manusia, sehingga relevan untuk dieksplorasi secara mendalam sebagai studi kasus tunggal.

3. Ruang Lingkup Waktu

Kegiatan penelitian ini difokuskan pada tahun ajaran 2024/2025 atau tahun anggaran 2025. Pada tahun tersebut, mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di bawah naungan Kementerian Agama mengalami perubahan signifikan. Penyaluran dana yang sebelumnya dilakukan dua kali

dalam setahun atau setiap semester, kini diubah menjadi dua tahap, di mana setiap tahap terdiri atas dua triwulan, sehingga total penyalurannya menjadi empat kali dalam satu tahun anggaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada pengelolaan dana BOS tahap pertama, yang mencakup triwulan I dan II pada tahun ajaran 2024/2025 atau tahun anggaran 2025.

4. Ruang Lingkup Subjek

Informan penelitian terdiri atas Kepala Madrasah, Bendahara BOS, Operator E-RKAM, perwakilan Guru dan Komite Madrasah, serta Pengawas dari Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang. Seluruh informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana BOS dan penggunaan Aplikasi E-RKAM.

5. Ruang Lingkup Metodologis

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang efektivitas penerapan E-RKAM dalam pengelolaan dana BOS di MIS DDI Wanio.

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki tingkat orisinalitas yang kuat karena mengangkat fenomena implementasi sistem informasi akuntansi berbasis E-RKAM dalam pengelolaan dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) DDI Wanio, yang hingga kini belum banyak dikaji secara mendalam. Meskipun topik E-RKAM telah diteliti sebelumnya, penelitian-penelitian terdahulu seperti Nindi Indri Gustiyati (2023) di MAN 2 Kota Bandung dan Mhd. Dandy Praditia (2024) di madrasah swasta Kota Medan berfokus pada efektivitas penerapan dan hasil kinerja sistem aplikasi E-RKAM, sedangkan Yuli Kartika Putri (2024) menyoroti tahapan administrasi perencanaan dan pelaporan di MI Muhammadiyah 10 Cempleng. Berbeda dari itu, penelitian ini menelaah proses dan pengalaman pengguna dalam menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis E-RKAM serta dampaknya terhadap akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOS di tingkat madrasah dasar.

Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus yang berfokus pada makna, proses, dan pengalaman aktor dalam penerapan sistem. Pendekatan ini berbeda dari studi-studi kuantitatif atau evaluatif sebelumnya karena menekankan eksplorasi mendalam melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan reflektif.

Selain itu, penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur karena belum banyak studi yang menghubungkan penerapan E-RKAM dengan aspek pengendalian internal dan praktik akuntabilitas pada madrasah tingkat dasar. Dengan posisi peneliti sebagai pihak eksternal, analisis dilakukan secara objektif untuk menggambarkan kondisi faktual dan tantangan di lapangan tanpa bias kelembagaan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan tata kelola keuangan madrasah, terutama dalam hal transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Sementara secara akademik, hasil penelitian memperkaya literatur dan referensi mengenai implementasi sistem informasi akuntansi di lingkungan pendidikan madrasah.